



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10263-10273

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Gerakan Prabu Peduli Lingkungan sebagai Kontrol Warga dalam Konflik Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Dhiya Fathiyatul Aulia, Wahyu Kartiko Utami, Revaldy Putra Razwa, Siti Dina Setiani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

6670230021@untirta.ac.id, wahyu.kartiko@untirta.ac.id, 6670230030@untirta.ac.id, 6670230028@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konflik pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan yang muncul akibat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang mengalami kelebihan kapasitas (overload), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Situasi tersebut mendorong lahirnya Gerakan Prabu Peduli Lingkungan sebagai bentuk partisipasi dan kontrol warga terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gerakan Prabu Peduli Lingkungan dalam mengawal kebijakan pengelolaan sampah serta memahami dinamika hubungan yang terjalin antara gerakan warga dan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan menggunakan teori gerakan sosial Sidney Tarrow yang menekankan pentingnya peluang politik, mobilisasi sumber daya, dan aksi kolektif dalam mendorong perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Prabu Peduli Lingkungan menjalankan fungsi kontrol warga melalui berbagai strategi, seperti advokasi kebijakan, demonstrasi, edukasi masyarakat, pemantauan implementasi kebijakan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye dan penyebaran informasi. Relasi antara gerakan ini dan pemerintah daerah bersifat dinamis, ditandai dengan adanya kerja sama dalam beberapa program sekaligus ketegangan yang muncul akibat perbedaan pandangan terkait solusi pengelolaan sampah. Meskipun menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal, gerakan ini tetap berkontribusi dalam mendorong terciptanya tata kelola pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Kontrol Warga, Gerakan Sosial, TPA Cipeucang, Prabu Peduli Lingkungan, Tangerang Selatan

1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, merupakan isu krusial yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi mendorong peningkatan volume sampah, terutama di wilayah perkotaan, yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat (Salsabila et al., 2024). Timbulan sampah yang tidak terkelola secara optimal berkontribusi terhadap degradasi kualitas lingkungan, baik pada ekosistem darat maupun perairan. Kondisi tersebut menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan (Luthfia Shabira et al., 2026).

Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah urban mengalami tekanan yang cukup tinggi dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan produksi sampah setiap hari (Muara Torang Hadomun, 2022). Kapasitas pengelolaan yang tersedia belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang dihasilkan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang sebagai fasilitas utama mengalami kelebihan kapasitas yang berdampak pada penumpukan sampah. Dampak lingkungan yang muncul meliputi pencemaran air tanah, pencemaran udara akibat bau menyengat, serta potensi gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi.

Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, melainkan juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan sosial. Koordinasi antar stakeholder belum berjalan secara optimal. Pembagian kewenangan antar lembaga menunjukkan adanya ketimpangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Kondisi tersebut memperlihatkan

bahwa pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak secara aktif.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan menunjukkan berbagai kendala dalam implementasinya. Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah masih menjadi hambatan utama. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal. Koordinasi antarinstansi belum mampu menciptakan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya efektivitas pengelolaan sampah dan memunculkan berbagai permasalahan turunan di masyarakat.

Situasi tersebut memunculkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sampah. Konflik menjadi semakin nyata ketika terjadi aksi protes masyarakat pada tahun 2025. Sejumlah warga, pegiat lingkungan, dan komunitas termasuk Gerakan Prabu Peduli Lingkungan (Prabu PL) melakukan unjuk rasa untuk mendesak pemerintah melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah di TPA Cipeucang. Kondisi sampah yang menumpuk, pencemaran lingkungan, serta dampak langsung terhadap masyarakat seperti air sumur yang tercemar dan bau menyengat menjadi faktor pemicu utama aksi tersebut (Monica Dian Adelina, 2025).

Aksi protes masyarakat mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Tuntutan yang diajukan mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir, optimalisasi fasilitas pengelolaan seperti TPS3R, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Perubahan posisi masyarakat dari objek menjadi subjek dalam pengelolaan lingkungan menjadi indikator penting dalam dinamika sosial yang berkembang.

Krisis pengelolaan sampah semakin terlihat ketika penutupan TPA Cipeucang pada tahun 2025 menyebabkan penumpukan sampah di berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan sampah yang belum mampu mengantisipasi lonjakan volume sampah secara sistematis dan berkelanjutan (Walhi, 2025). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, melainkan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang harus menghadapi kondisi darurat sampah di ruang publik.

Kondisi krisis pengelolaan sampah di TPA Cipeucang tergambar melalui kesaksian masyarakat yang terdampak langsung. Warga menyampaikan keluhan mengenai buruknya tata kelola sampah yang menyebabkan penumpukan dalam skala besar. Dampak yang dirasakan mencakup gangguan lingkungan dan kesehatan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Kesaksian warga lokal akibat buruknya tata kelola sampah di TPA Cipeucang, Kota Tangerang Selatan

Sumber: Instagram @sahabatpedulilingkungan, 2025

Gambar tersebut menunjukkan kondisi faktual di lapangan yang memperlihatkan dampak langsung dari buruknya pengelolaan sampah. Kesaksian masyarakat menggambarkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak sosial dan kesehatan. Fenomena tersebut memperkuat adanya konflik antara

masyarakat dan pemerintah. Kebutuhan akan kontrol sosial dari masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi semakin penting.

Gerakan Prabu Peduli Lingkungan (Prabu PL) muncul sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam merespon permasalahan tersebut. Komunitas berbasis relawan ini berakar dari Persatuan Pemuda Burangkeng. Fokus kegiatan meliputi advokasi, edukasi, serta aksi nyata dalam pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan. Peran Prabu PL mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perbaikan tata kelola lingkungan.

Peran kontrol warga melalui gerakan sosial memiliki posisi strategis dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang partisipatif. Gerakan sosial tidak hanya berfungsi sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai aktor dalam dinamika konflik kebijakan lingkungan. Tekanan sosial yang dilakukan masyarakat menjadi salah satu mekanisme untuk mendorong pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat (Rahayu et al., 2021).

Tantangan dalam pelaksanaan kontrol warga masih cukup kompleks. Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam menjalankan gerakan secara berkelanjutan. Kompleksitas konflik antar stakeholder mempengaruhi efektivitas gerakan sosial. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai peran gerakan sosial dalam konteks konflik pengelolaan sampah (Ulfa Alifiyah et al., 2025).

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami dinamika gerakan sosial masyarakat dalam konflik lingkungan. Fokus kajian diarahkan pada peran Gerakan Prabu Peduli Lingkungan sebagai bentuk kontrol warga dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Pada kondisi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan yang masih belum optimal dan berdampak pada rendahnya efektivitas sistem pengelolaan serta perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pengawasan kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Konflik antara masyarakat dan pemerintah memperlihatkan pentingnya kontrol warga sebagai mekanisme sosial dalam mendorong perbaikan kebijakan. Peran gerakan sosial berbasis masyarakat menjadi semakin relevan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dipilih karena fokus kajian terletak pada satu fenomena spesifik, yakni peran gerakan masyarakat (Prabu Peduli Lingkungan) dalam konteks konflik pengelolaan sampah di wilayah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam dinamika sosial, aktor-aktor yang terlibat, serta proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam praktik kontrol warga. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sehingga mampu memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana gerakan lingkungan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam konflik kebijakan publik.

Sesuai yang digagaskan Creswell (2008), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menyelidiki dan memahami suatu fenomena utama. Pada intinya, studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan investigasi mendalam terhadap kehidupan nyata (*a real-life*), sistem kontemporer terbatas (*contemporary bounded system or a case*), kumpulan sistem terbatas (*multiple bounded systems or cases*), pengumpulan data yang menyeluruh dan rinci dari berbagai sumber informasi (*in-depth data collection*) melalui observasi, wawancara, materi audio-visual, berita, serta dokumen dan laporan lainnya.

b. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam fenomena spesifik yang terjadi pada individu, kelompok, atau suatu konteks sosial tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka

konseptual studi kasus yang dikemukakan oleh Creswell (2015), yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kasus yang diteliti. Maka fokus penelitian ini adalah menganalisis gerakan Prabu Peduli Lingkungan sebagai kontrol sosial terhadap konflik atas sampah di Kota Tangerang Selatan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini akan membantu penulis untuk menganalisis secara mendalam terhadap gerakan Prabu Peduli Lingkungan yang menyoroti persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan. Kami ingin melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Prabu Peduli Lingkungan untuk menginisiasi gerakan bersama masyarakat, supaya pemerintah sadar akan bahaya dari sampah yang kian menumpuk. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

3. Hasil dan Diskusi

a. Gambaran Umum Konflik Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah perkotaan yang mengalami peningkatan timbulan sampah cukup signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan persampahannya, Kota Tangerang Selatan mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang sebagai fasilitas utama pembuangan dan pengolahan sampah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip oleh Kompas, timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan masyarakat masih sangat tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah yang tersedia (Azahra Nur Annisa, & Fatma Ainun Safitri, 2026; Kompas, 2026).

Tabel 1. Timbulan Sampah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (Kg/hari)
1.	Serpong	174.979	125.985
2.	Serpong Utara	146.305	105.340
3.	Pondok Aren	313.275	225.558
4.	Ciputat	235.618	169.645
5.	Ciputat Timur	176.522	127.096
6.	Pamulang	341.286	245.726
7.	Setu	98.133	70.656
Total		1.486.118	1.070.005

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan (2026)

Berdasarkan Tabel 1, timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan meningkat dari 972,63 ton per hari pada tahun 2022 menjadi 1.022 ton per hari pada tahun 2024. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengurangan sampah, volume sampah yang harus ditangani pemerintah daerah masih tergolong tinggi. Peningkatan timbulan sampah tersebut memberikan beban yang semakin besar terhadap kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia, khususnya pada TPA Cipeucang sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Tangerang Selatan.

TPA Cipeucang merupakan fasilitas utama yang menampung sampah dari seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun, tingginya volume sampah yang masuk setiap hari menyebabkan kapasitas TPA semakin terbatas. Landfill 1 dan landfill 2 telah ditutup karena penuh, sedangkan landfill 3 yang sebelumnya masih beroperasi juga telah mencapai kapasitas maksimum sehingga tidak lagi mampu menerima sampah secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TPA Cipeucang telah mengalami overload dan menghadapi keterbatasan daya tampung yang serius.



Gambar 2. Kondisi TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan
Sumber : (Tangerangselatan.go.id, 2026)

Kondisi overload TPA Cipeucang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan. Kedua, praktik pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber masih belum dilakukan secara optimal sehingga sebagian besar sampah langsung dibuang ke TPA. Ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya penggunaan kemasan sekali pakai dan aktivitas belanja daring, turut meningkatkan jumlah sampah yang harus dikelola setiap hari. Akibatnya, usia operasional landfill menjadi lebih pendek dibandingkan dengan perencanaan awal karena volume sampah yang masuk terus meningkat setiap tahunnya (Environesia Global Saraya, 2025).

Permasalahan tersebut semakin memburuk pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 ketika kapasitas TPA Cipeucang tidak lagi mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa TPA Cipeucang menerima sekitar 1.200 ton sampah per hari dan telah mengalami kondisi overload dalam jangka waktu yang cukup lama. Tingginya ketergantungan terhadap satu lokasi pembuangan akhir menyebabkan sistem pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan menjadi rentan ketika kapasitas TPA mencapai batas maksimal. Kondisi ini kemudian memicu krisis persampahan di berbagai wilayah kota.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat melalui terjadinya penumpukan sampah di sejumlah titik Kota Tangerang Selatan. Sampah menumpuk di kawasan permukiman, fasilitas umum, dan beberapa ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Selain menurunkan kualitas kebersihan lingkungan, penumpukan sampah juga menimbulkan bau tidak sedap serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Krisis sampah yang terjadi menunjukkan bahwa persoalan persampahan di Kota Tangerang Selatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas tata kelola lingkungan perkotaan secara keseluruhan (kompas.com, 2020).

Penumpukan sampah yang berlangsung dalam periode tersebut menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat karena mengganggu kenyamanan lingkungan. Timbunan sampah yang tidak segera terangkut menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan memunculkan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah penanganan yang lebih efektif. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil yang memberikan perhatian terhadap isu lingkungan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan berbagai upaya penanganan, antara lain menjalin kerja sama dengan TPA Regional Nambo di Provinsi Jawa Barat dan TPA Cilowong di Kota Serang sebagai lokasi alternatif pengolahan sampah. Selain itu, pemerintah juga mendorong program pengurangan sampah dari sumber melalui gerakan satu RW satu bank sampah serta pembuatan lubang biopori untuk mengelola sampah organik di tingkat masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi

volume sampah yang dibuang ke TPA sekaligus memperpanjang usia operasional fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia.

Dengan demikian, konflik pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan berawal dari meningkatnya timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Kondisi overload TPA Cipeucang menyebabkan terganggunya sistem pengelolaan sampah kota dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan maupun sosial. Dampak tersebut kemudian memunculkan perhatian publik terhadap tata kelola persampahan di Kota Tangerang Selatan serta mendorong munculnya berbagai upaya untuk mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

b. Profil dan Latar Belakang Gerakan Prabu Peduli Lingkungan

Gerakan Peduli Lingkungan Prabu lahir dari keprihatinan bersama atas masalah sampah yang sudah lama terjadi di wilayah Jakarta Raya. Nama "Prabu" merupakan singkatan dari tiga wilayah yang menjadi titik awal gerakan ini: Bantar Gebang, Sumur Batu, dan Burangkeng. Ketiga wilayah ini selama bertahun-tahun telah terdampak oleh pengelolaan sampah dari daerah sekitarnya. Gerakan ini mulai terbentuk sekitar dua hingga tiga tahun sebelum wawancara, dengan pusat koordinasi di Bekasi. Kehadirannya semakin dikenal ketika masalah sampah di Tangerang Selatan mencapai puncaknya pada bulan November dan Desember, ditandai dengan gambar viral tumpukan sampah di pinggir jalan yang hanya ditutupi terpal. Situasi ini memicu perhatian publik dan mendorong Prabu untuk lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu lingkungan.

Seiring perkembangannya Prabu tidak lagi hanya beroperasi secara lokal. Organisasi ini membangun jaringan melalui sistem node di beberapa wilayah untuk menanggapi isu-isu lingkungan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Selain pusat gerakan di Bekasi, sebuah node juga didirikan di Tangerang Selatan, yang dikoordinasikan oleh informan untuk penelitian ini. Model jaringan ini memungkinkan gerakan tersebut untuk bekerja lebih erat dengan masyarakat dan memahami isu-isu secara lebih kontekstual. Namun, menjaga keberlanjutan gerakan ini bukanlah hal yang mudah. Narasumber menjelaskan bahwa beberapa anggota mengalami kelelahan karena proses advokasi seringkali tidak menghasilkan perubahan yang cepat. Oleh karena itu, komunikasi dan hubungan antar anggota terus dijaga untuk mempertahankan semangat kolektif (Studi et al., 2020).

Dalam melaksanakan kegiatannya Prabu berfokus pada pengelolaan sampah dari sumber utama, yaitu rumah tangga. Menurut mereka, penyelesaian masalah sampah tidak dapat dilakukan hanya di tempat pembuangan akhir; hal itu harus dimulai dengan mengubah perilaku masyarakat. Berdasarkan data mereka, setiap orang menghasilkan sekitar 0,5 hingga 0,7 kilogram sampah per hari, yang sebagian besar adalah sampah organik. Berdasarkan hal ini, Prabu aktif melakukan penyuluhan, pelatihan pemilahan sampah, dan kampanye pendidikan melalui media sosial. Selain kegiatan pendidikan, mereka juga melakukan advokasi kebijakan dengan berkoordinasi langsung dengan masyarakat di sekitar TPA Cipeucang untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui demonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor walikota. Media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah, karena perhatian terhadap suatu isu seringkali meningkat ketika menjadi viral (Pasaribu et al., 2024).

Gerakan ini tidak hanya memandang sampah sebagai masalah lingkungan teknis. Prabu memandangnya sebagai bagian dari tantangan yang lebih besar: krisis iklim. Menurut para pembicara, kondisi lingkungan saat ini menunjukkan tingkat kerusakan yang membutuhkan tindakan serius dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka berupaya meningkatkan kesadaran bahwa melindungi lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dalam berbagai kegiatan kampanye, Prabu juga secara aktif mendorong generasi milenial dan Generasi Z untuk terlibat sesuai dengan metode dan minat masing-masing. Kelompok usia ini dipandang sebagai kelompok yang akan menghadapi dampak jangka panjang dari krisis lingkungan, sehingga partisipasi mereka sangat penting.

Untuk mencapai perubahan berkelanjutan Prabu mendorong penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan lima elemen utama: akademisi, masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas. Mereka percaya bahwa masalah sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Kolaborasi adalah persyaratan utama untuk implementasi berbagai kebijakan dan program lingkungan yang efektif. Para pembicara juga menyoroti perlunya penegakan peraturan yang lebih ketat dan pembagian fungsi kelembagaan yang lebih jelas, terutama ketika lembaga seperti Badan Lingkungan Hidup masih berperan sebagai operator, regulator, dan evaluator. Ke

depannya, Prabu berharap adanya lembaga pemantauan dan evaluasi independen, dukungan anggaran yang memadai, dan keterlibatan semua pihak, yang melampaui kegiatan seremonial. Semua gagasan ini pada dasarnya berakar dari prinsip sederhana yang menjadi dasar gerakan ini, yaitu melindungi alam sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

c. Bentuk Kontrol Warga Yang Dilakukan Prabu Peduli Lingkungan

Salah satu bentuk kontrol warga yang dilakukan oleh Prabu Peduli Lingkungan (Prabu Peduli Lingkungan) terlihat melalui advokasi dan aksi kolektif yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan. Ketika masalah sampah di Tangerang Selatan memburuk dan TPA Cipegang menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar, seperti tanah longsor dan air lindi yang mengalir ke permukiman penduduk, Prabu segera berkoordinasi dengan warga yang terdampak. Bersama masyarakat, mereka mengorganisir berbagai protes untuk menuntut perhatian pemerintah. Aksi-aksi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan demonstrasi warga di sekitar TPA, diikuti dengan penyampaian aspirasi mereka di gedung DPRD, dan terakhir, demonstrasi mahasiswa di kantor walikota, membawa sampah sebagai simbol protes. Pola gerakan ini menunjukkan bahwa advokasi tersebut bukanlah spontan, melainkan terstruktur secara bertahap untuk meningkatkan tekanan publik kepada pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan (Shabira et al., 2026).

Prabu juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana kontrol warga terhadap kebijakan publik. Menurut sumber, tekanan publik yang dihasilkan di ruang digital seringkali menjadi faktor penting dalam mendorong respons pemerintah terhadap suatu masalah. Situasi ini diilustrasikan oleh ungkapan "tidak viral, tidak ada keadilan," yang menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap suatu masalah seringkali meningkat ketika mendapat perhatian luas di media sosial. Fenomena viral tumpukan sampah yang hanya ditutupi terpal di pinggir jalan di Tangerang Selatan adalah contoh bagaimana tekanan publik di ruang digital dapat mempercepat respons pemerintah. Oleh karena itu, media sosial digunakan tidak hanya untuk menyebarkan informasi tetapi juga untuk membangun opini publik, memperluas dukungan masyarakat, dan menjaga kesadaran akan isu-isu lingkungan.

Selain pendekatan advokasi, Prabu juga melakukan kontrol warga melalui kegiatan pendidikan. Organisasi ini secara rutin mengadakan penyuluhan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah, khususnya mengenai pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Menurut mereka, perubahan perilaku publik tidak dapat terjadi secara instan tetapi membutuhkan proses pendidikan yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan karena banyak program pengelolaan sampah masih dianggap belum berjalan optimal di lapangan. Beberapa fasilitas yang disediakan, seperti tempat sampah terpisah dan biodigester, seringkali tidak dimanfaatkan sepenuhnya setelah program selesai. Melalui kegiatan pendidikan ini, Prabu berupaya meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah lingkungan di sekitar mereka.

Peran pengawasan warga juga terlihat dalam fungsi pemantauan kebijakan yang berkelanjutan. Prabu tidak hanya menyuarakan kritik tetapi juga mengikuti perkembangan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah. Salah satu kekhawatiran mereka adalah rencana pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik dari Sampah (PSEL) di daerah Cipegang. Pemantauan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari studi kelayakan dan alokasi anggaran untuk pengadaan lahan hingga dampak sosial yang kemungkinan akan dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak. Lebih lanjut, mereka juga berupaya mengumpulkan data dan informasi lapangan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah. Langkah ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan mereka tidak hanya berdasarkan opini tetapi juga didukung oleh upaya pengumpulan informasi yang sistematis (Prasetyo, 2020).

Prabu juga menjalankan fungsi pengawasannya dengan mengkritik berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. Para informan menilai bahwa beberapa kebijakan masih berfokus pada mitigasi dampak, daripada mengatasi akar penyebabnya. Sebagai contoh, penggunaan cairan penghilang bau di tempat pembuangan sampah dianggap hanya memiliki efek sementara. Mereka juga mempertanyakan efektivitas relokasi sampah ke area lain, karena tindakan ini hanya menggeser masalah tanpa menyelesaikannya. Kritik serupa juga diungkapkan mengenai rencana pengembangan PSEL, yang digadang-gadang sebagai solusi utama untuk pengelolaan sampah. Menurut Prabu, keberhasilan teknologi ini perlu dibuktikan melalui evaluasi yang jelas dan terukur. Melalui masukan-masukan ini, Prabu mendorong kebijakan pengelolaan sampah untuk didasarkan pada data yang kuat, didukung oleh peraturan yang ditegakkan secara konsisten, dengan sistem kelembagaan yang akuntabel, dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi independen. Dengan cara ini, kontrol warga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kritik tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan bertanggung jawab (Insani & Ekasari, 2022).

d. Analisis Gerakan Prabu Peduli Lingkungan Berdasarkan Teori Gerakan Sosial Sidney Tarrow

Analisis gerakan Prabu Peduli Lingkungan melalui teori gerakan sosial Sidney Tarrow memperlihatkan bahwa konflik sampah di Kota Tangerang Selatan bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan, tetapi juga persoalan politik lingkungan. Gerakan sosial muncul dalam perspektif Tarrow, ketika warga memiliki tujuan bersama, solidaritas, serta interaksi berkelanjutan dengan elite, lawan, dan otoritas. Dapat dibaca melalui logika tersebut, prabu tidak hanya hadir sebagai komunitas yang peduli kebersihan, tetapi sebagai aktor warga yang menekan pemerintah agar bertanggung jawab atas kelola sampah. Gerakan sosial terbentuk ketika keluhan warga bertemu dengan peluang politik, jaringan mobilisasi, bentuk aksi kolektif, dan pembingkayaan masalah yang kuat (Irawan et al., 2022).

Kesempatan politik muncul ketika legitimasi pemerintah melemah akibat krisis pelayanan publik. Prabu dalam wawancara menjelaskan bahwa titik balik gerakan terjadi saat sampah menumpuk di jalan pada November hingga Desember, bahkan hanya sebagian ditutup terpal. Mereka juga menilai TPA Cipeucang sudah mencemari lingkungan karena terjadi longsor sampah, penyebaran air lindi, dan bau yang sangat mengganggu warga sekitar. Situasi ini sesuai dengan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut TPA Cipeucang seluas 5 hektare telah overload dan bersinggungan langsung dengan Sungai Cisadane (KemenLH/BPLH, 2025). Pada titik ini, terbuka ruang protes karena warga dapat menunjukkan bukti konkret bahwa sistem pengelolaan sampah tidak berjalan aman. Struktur kesempatan politik juga terlihat dari adanya ketegangan antara kebijakan formal dan praktik lapangan. Secara hukum, UU Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan perlunya kepastian tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Namun, Prabu menilai tanggung jawab tersebut belum dijalankan secara konsisten. Mereka kritik tajam, yaitu pemerintah sering mengajak masyarakat ketika masalah sudah membesar, tetapi masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam pembahasan anggaran, perencanaan, dan evaluasi.

Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial memerlukan jaringan sosial yang mampu menghubungkan individu, kelompok, dan sumber daya supaya aksi tidak terhenti sebagai keluhan pribadi (Tarrow, 2022). Prabu Peduli Lingkungan memiliki basis mobilisasi dari jaringan yang awalnya di wilayah Bantargebang, Sumur Batu, dan sampailah membentuk simpul di Tangsel dan Bekasi. Prabu juga menyebut perlunya model pentahelix yang melibatkan akademisi, masyarakat terdampak, pemerintah, pihak swasta, dan unsur pengawasan. Cara pandang ini menunjukkan bahwa Prabu tidak hanya bergerak sebagai kelompok protes, tetapi juga sebagai penghubung antaraktor dalam konflik tata kelola sampah. Mobilisasi Prabu juga berjalan melalui edukasi dan penguatan kesadaran warga. Dalam wawancara, Prabu menekankan bahwa sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga, sehingga pemilahan dari rumah menjadi langkah paling masuk akal.

Repertoar aksi dalam teori Tarrow mencakup bentuk-bentuk tindakan yang dipilih gerakan untuk menyampaikan tuntutan, mulai dari demonstrasi, aksi simbolik, petisi, hingga media digital. Beberapa repertoar sekaligus digunakan oleh Prabu. Mereka turun langsung melihat kondisi rumah warga sekitar TPA, koordinasi dibangun dengan Prabu pusat, menggandeng masyarakat sekitar, aksi demonstrasi, dan tentu mendorong isu ini melalui media sosial. Prabu mencatat juga bahwa pola respons pemerintah sering muncul setelah isu menjadi viral. Memperlihatkan bahwa media sosial menjadi bagian dari repertoar kontemporer dalam konflik lingkungan. Bukan sebagai pengganti aksi lapangan, tetapi aksi digital untuk memperluas tekanan publik terhadap pemerintah (Sajian & Alif, 2025). Repertoar Prabu tidak berhenti pada protes. Mereka juga menawarkan kritik kebijakan dan alternatif pengelolaan. Prabu menilai pemindahan sampah ke TPA Cilowong bukan solusi utama, melainkan pemindahan masalah.

Pembingkayaan kolektif atau framing dalam pandangan Tarrow sebagai proses ketika gerakan memberi makna pada masalah, menunjuk sumber ketidakadilan, menawarkan solusi dan alasan moral terbangun untuk bertindak. Prabu membingkai masalah sampah sebagai masalah keadilan lingkungan, bukan hanya masalah bau atau keterlambatan truk. Prabu menegaskan bahwa lingkungan yang rusak membutuhkan waktu lama untuk pulih, sedangkan warga terus memproduksi sampah setiap hari. Mereka juga mengajak generasi muda untuk bergerak dengan gaya masing-masing. Pembungkayaan ini kuat karena menggabungkan pengalaman lokal, data sampah rumah tangga, dan isu krisis iklim. Pembungkayaan kolektif Prabu juga terlihat dalam kritik terhadap seremonialisme kebijakan. Prabu menilai beberapa program pemilahan, tong sampah, biopori, dan kampanye lingkungan sering berhenti pada seremoni karena tidak dievaluasi efektivitasnya.

e. Relasi dan Ketegangan antara Prabu Peduli Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup

Relasi antara Prabu Peduli Lingkungan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dapat dipahami sebagai relasi yang berada di antara kerja sama, kritik, dan ketegangan. Di satu sisi, kedua aktor sama-sama mengakui bahwa persoalan sampah di Tansel sudah masuk tahap serius. DLH menyatakan bahwa TPA Cipeucang sudah penuh, dengan landfill 1 dan 2 tidak lagi beroperasi, sedangkan landfill 3 juga sudah mencapai kapasitas maksimal. Kondisi ini membuat DLH tidak dapat melayani pembuangan sampah seperti biasa karena ada risiko longsor dan dampak lingkungan lain. Data Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan tekanan yang besar karena timbulan sampah tahun 2025 mencapai 1.070.005 ton per hari. Artinya, ketegangan tidak muncul dalam ruang kosong. Ketegangan lahir dari krisis pelayanan publik yang benar-benar dirasakan warga.

Ketegangan mulai menguat ketika krisis teknis berubah menjadi krisis kepercayaan. Dalam wawancara, pada November sampai Desember sampah sempat menumpuk di pinggir jalan dan beberapa titik hanya ditutup terpal. Prabu melihat kondisi ini sebagai tanda bahwa pemerintah tidak siap menghadapi beban sampah kota. Mereka juga menyebut adanya pencemaran sekitar TPA Cipeucang, mulai dari bau, air lindi, hingga risiko longsor. Situasi itu kemudian mendorong Prabu bergerak, berkoordinasi dengan jaringan Prabu pusat, mendatangi warga sekitar TPA, lalu ikut dalam gelombang demonstrasi warga. Aksi dilakukan di sekitar TPA, DPRD, dan kantor wali kota. Berita Ekuatorial juga mencatat bahwa unjuk rasa pada 18 Desember 2025 melibatkan warga, pegiat lingkungan, Prabu Peduli Lingkungan, Cipeucang Bergerak, dan beberapa kelompok lain yang mendesak pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah.

Prabu Peduli Lingkungan menjalankan kontrol warga melalui produksi informasi tandingan, observasi lapangan, pengorganisasian warga, demonstrasi, dan penggunaan media sosial. Berdasarkan wawancara, gerakan ini mendatangi permukiman terdampak, melihat kondisi sekitar Cipeucang, berkoordinasi dengan jaringan Prabu di daerah lain, serta mendukung aksi warga ke DPRD dan kantor pemerintah kota. Strategi tersebut menunjukkan bahwa kontrol warga tidak terbatas pada penyampaian kritik secara verbal. Prabu berusaha mengubah pengalaman warga, seperti bau menyengat dan kekhawatiran terhadap air lindi, menjadi persoalan publik yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Karakter tersebut sejalan dengan profil organisasi yang menempatkan fakta, data, kajian regulasi, dan kampanye sebagai dasar gerakan. Meskipun demikian, keterangan wawancara tetap perlu diuji silang dengan dokumen pemerintah, pemberitaan, dan observasi lapangan agar analisis tidak hanya bergantung pada klaim salah satu pihak.

Dari sisi pemerintah, respons terhadap krisis memperlihatkan kombinasi antara tindakan darurat dan perencanaan jangka panjang. Pemerintah melakukan pengangkutan bertahap, penataan landfill, penyemprotan pengurang bau, kerja sama pembuangan dengan daerah lain, penguatan bank sampah dan biopori, serta mendorong pembangunan fasilitas pengolahan lanjutan. Pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat dan menerbitkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2025–2035. Meski menunjukkan adanya respons kebijakan, Prabu menilai belum menyentuh akar masalah karena masih dominan berorientasi pada pemindahan dan pemrosesan sampah di hilir. Pemindahan sampah ke wilayah lain dapat mengurangi tumpukan di Tansel, tetapi tidak otomatis mengurangi produksi sampah. Dalam perspektif politik lingkungan, tindakan tersebut berpotensi memindahkan beban ekologis dari satu kelompok warga kepada kelompok warga lainnya.

f. Hambatan Gerakan Prabu Peduli Lingkungan Sebagai Kontrol Warga

Dalam menjalankan perannya sebagai gerakan masyarakat sipil yang melakukan kontrol terhadap kebijakan pengelolaan sampah di TPA Cipeucang, Prabu PL menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas gerakan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal organisasi, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat serta respons pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.

Hambatan pertama berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, Prabu PL menilai bahwa sebagian besar masyarakat masih belum menjadikan pemilahan dan pengurangan sampah sebagai budaya sehari-hari. Program-program yang telah dilakukan, seperti sosialisasi, edukasi melalui media sosial, dan pelatihan pengelolaan sampah, belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya partisipasi ini menyebabkan upaya pengurangan sampah dari sumbernya belum berjalan secara optimal.

Hambatan kedua adalah keberlanjutan gerakan. Prabu PL mengakui bahwa menjaga konsistensi aktivisme lingkungan bukanlah hal yang mudah. Banyak individu yang pada awalnya terlibat kemudian mengalami kelelahan karena menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya dukungan, lambatnya perubahan kebijakan, serta proses advokasi yang panjang. Kondisi tersebut membuat regenerasi dan pemeliharaan semangat kolektif menjadi tantangan bagi keberlangsungan gerakan.

Selain itu, keterbatasan data dan sistem evaluasi juga menjadi hambatan penting. Prabu PL menilai bahwa kebijakan pengelolaan sampah sering kali tidak didasarkan pada data yang akurat dan basis informasi yang kuat. Menurut mereka, evaluasi terhadap berbagai program pemerintah, seperti bank sampah, biopori, maupun rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, belum dilakukan secara menyeluruh sehingga efektivitasnya sulit diukur. Akibatnya, gerakan masyarakat sipil juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan berbasis bukti.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan respons pemerintah. Prabu PL berpandangan bahwa pemerintah cenderung lebih responsif ketika persoalan sampah telah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Fenomena “no viral, no justice” menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat sering kali baru memperoleh tindak lanjut setelah mendapat tekanan dari opini publik. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan dinilai masih terbatas, sehingga fungsi kontrol warga belum terakomodasi secara maksimal.

Dengan berbagai hambatan tersebut, Prabu PL memandang bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah ataupun gerakan masyarakat secara terpisah. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta melalui pendekatan partisipatif agar fungsi kontrol warga terhadap kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Konflik pengelolaan sampah di Tangerang Selatan bermula dari kelebihan kapasitas TPA Cipeucang, yang tidak lagi mampu menampung lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Situasi ini memunculkan berbagai masalah lingkungan yang secara langsung berdampak pada masyarakat sekitar, sehingga memicu munculnya Gerakan Prabu Peduli Lingkungan sebagai bentuk partisipasi warga dalam memantau dan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah. Dalam menjalankan perannya, Prabu Peduli Lingkungan menggunakan berbagai strategi, mulai dari advokasi, demonstrasi, pendidikan publik, hingga penggunaan media sosial untuk membangun tekanan publik. Jika dianalisis menggunakan perspektif gerakan sosial Sidney Tarrow, gerakan ini menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan peluang politik yang tersedia, membangun jaringan mobilisasi, dan membingkai isu lingkungan sebagai bentuk ketidakadilan yang membutuhkan perhatian kolektif. Strategi ini memungkinkan isu sampah tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga berkembang menjadi isu publik yang melibatkan banyak aktor.

Referensi

1. Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Riset: Memilih diantara Lima*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
2. Journal, P. C. D., & Viii, V. (2020). *Power, Conflict and Democracy In South and Southeast Asia. VIII(1)*.
3. Luthfia Shabira, TB. Yudi Muhtadi, E. P. (2026). ANALISIS RELASI KEKUASAAN DAN KESENJANGAN KEWENANGAN ANTAR DOI : *Journal of Public Administration Studies*, 5, 28–38.
4. Monica Dian Adelina. (2025). *Sampah numpuk, warga Tangsel desak perubahan sistem kelola TPA Cipeucang*. Ekuatorial.Com. <https://www.ekuatorial.com/2025/12/sampah-menumpuk-warga-tangsel-desak-perubahan-sistem-kelola-tpa-cipeucang/>
5. Muara Torang Hadomun, R. W. T. (2022). Kebijakan : *Jurnal Ilmu Administrasi KAWASAN DAN TIMBULAN DI KOTA TANGERANG SELATAN. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13, 7–14.
6. Rahayu, D., Riyansah, A., & Astuti, D. S. (2021). *Gerakan Zero Waste Sebagai Bentuk Peduli Pada Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan*. 3(2), 125–138.
7. Salsabila, N., Nurcahyanto, H., Yuniningsih, T., Publik, D. A., & Semarang, K. (2024). EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN SOUTH. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/44606/31282>.
8. Tarrow, S. (2022). *Power in Movement*. Cambridge university press.
9. Ulfa Alifiyah, Muhammad Azka A.M, Cut Fatimah Keumala Putri, Aprilian Andini, Siti Awaliah Latifah, E. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Perilaku Masyarakat di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3).
10. Walhi. (2025). *Penutupan TPA Cipeucang Tangerang Selatan: Momentum Koreksi Total Tata Kelola Sampah*. Walhi.or.Id. <https://www.walhi.or.id/penutupan-tpa-cipeucang-tangerang-selatan-momentum-koreksi-total-tata-kelola-sampah>
11. Ahmad Jamil Pasaribu , Muhammad Taslim , Abdur Rahim. (2024). 18(1978), 2525–2534.
12. Azahra Nur Annisa, Fatma Ainun Safitri, S. A. (2026). *Tantangan Pemerintahan Daerah dalam Kerja Sama Antar Daerah : Kasus Pembatalan PKS Sampah Tangerang Selatan-Pandeglang*. 5(3), 64–76.

13. Environesia Global Saraya. (2025). TPA Cipeucang Overload, Apa Solusi Berkelanjutan yang Perlu Segera Diterapkan? *Environesia Consultant*. <https://environesia.co.id/blog/TPA-Cipeucang-Overload-Apa-Solusi-Berkelanjutan-yang-Perlu-Segera-Diterapkan>
14. Insani, R. M., & Ekasari, A. M. (2022). *Identifikasi Kapasitas Masyarakat Pemulung dalam Menghadapi Bencana Longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat*. 445–449.
15. Kompas.com. (2020). Turap TPA Cipeucang Jebol, Dinas LH Tangsel: Tumpukan Sampah Overload. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/23/13120211/turap-tpa-cipeucang-jebol-dinas-lh-tangsel-tumpukan-sampah-overload>
16. Kompas. (2026). Krisis Sampah di Kota Tangerang Selatan dan Minimnya Peran TPS 3 R. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.id/artikel/krisis-sampah-di-kota-tangerang-selatan-dan-minimnya-peran-tps-3r>
17. Prasetyo, E. (2020). *ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ENGAGEMENT): STUDI KASUS PROGRAM REVALUASI BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN*. 1–16.
18. Studi, P., Industri, T., Teknik, F., Tarumanagara, U., & Sosial, M. (2020). *MODEL SOSIAL BISNIS PAGUYUBAN PENGEPUL SAMPAH MANDIRI TANGERANG SELATAN DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI PARTISIPASI* Helena Juliana Kristina. 8(3), 161–171.
19. Studi, P., Publik, A., Islam, U., & Yusuf, S. (2026). *ANALISIS RELASI KEKUASAAN DAN KESENJANGAN KEWENANGAN ANTAR* DOI : 5, 28–38.
20. Tangerang Selatan.go.id. (2026). *Pilar Dampingi KLH Tinjau TPA Cipeucang, Penataan dan Pengelolaan Sampah Tangsel Sesuai Aturan Pusat*. Berita.Tangerangselatan.Go.Id. <https://berita.tangerangselatankota.go.id/berita/pilar-dampingi-klh-tinjau-tpa-cipeucang-penataan-dan-pengelolaan-sampah-tangsel-sesuai-aturan-pusat>
21. Irawan, E. Y., Gunawan, W., & Sulaeman, M. (2022). Tahapan gerakan sosial sidney tarrow dalam kasus serikat petani piondo sulawesi tengah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1).
22. KemenLH/BPLH. (2025). Menahun Tanpa Progres, Menteri LH Ingin Segera Pemerintah Kota Tangsel Putus Rantai Masalah Sampah Lewat Kolaborasi Multipihak. Tersedia pada <https://kemenlh.go.id/news/detail/menahun-tanpa-progres-menteri-lh-ingin-segera-pemerintah-kota-tangsel-putus-rantai-masalah-sampah-lewat-kolaborasi-multipihak>, diakses pada 09 Juni 2026
23. Sajian, A., & Alif, A. (2025). Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Pada Isu Sosial Kontemporer. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies Global*, 1(2), 49-54.